

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI TANJUNG KAIT DI KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG

Silvia Nursafa¹, Amni Zarkasyi Rahman², Retna Hanani³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan RENSTRA Disporabudpar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, Pantai Tanjung Kait adalah salah satu pantai yang sangat berpotensi karena tidak hanya memiliki objek wisata pantai, sehingga pantai ini sangat diminati oleh masyarakat. Namun, belakangan ini Pantai Tanjung Kait mengalami sepi pengunjung yang disebabkan oleh banyak faktor. Banyaknya permasalahan di Pantai Tanjung Kait tentu tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga Pemkab Tangerang berupaya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak atau yang disebut *collaborative governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait serta faktor yang mendorong atau menghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait sudah berjalan, tetapi masih belum optimal. Hal ini karena masih terdapat aktor yang belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam kegiatan forum koordinasi, seperti kurang berpartisipasi secara aktif. Dalam upaya membangun kepercayaan juga masih terdapat aktor yang bersikap kurang terbuka yakni belum menyampaikan informasi secara menyeluruh. Faktor pendorong kolaborasi ini yaitu adanya kondisi awal yang baik karena para aktor memiliki kesadaran untuk berkolaborasi yang didorong oleh adanya keterbatasan sumber daya dari masing-masing aktor serta keberadaan pemimpin yang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan aktor yaitu melalui pelatihan, pembinaan serta *monitoring*. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah faktor desain institusional yaitu mencakup aturan dasar dalam proses kolaborasi dimana keterbukaan antar beberapa aktor dalam kolaborasi ini masih kurang.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pariwisata, Pantai Tanjung Kait

ABSTRACT

Based on the Tangerang Regency Disporabudpar RENSTRA for 2019-2023, Tanjung Kait Beach is one of the beaches that has great potential because it not only has beach tourist attractions, so this beach is very popular with the public. However, recently Tanjung Kait Beach has experienced a lack of visitors due to many factors. The many problems at Tanjung Kait Beach certainly cannot be resolved by one agency alone considering the limited resources

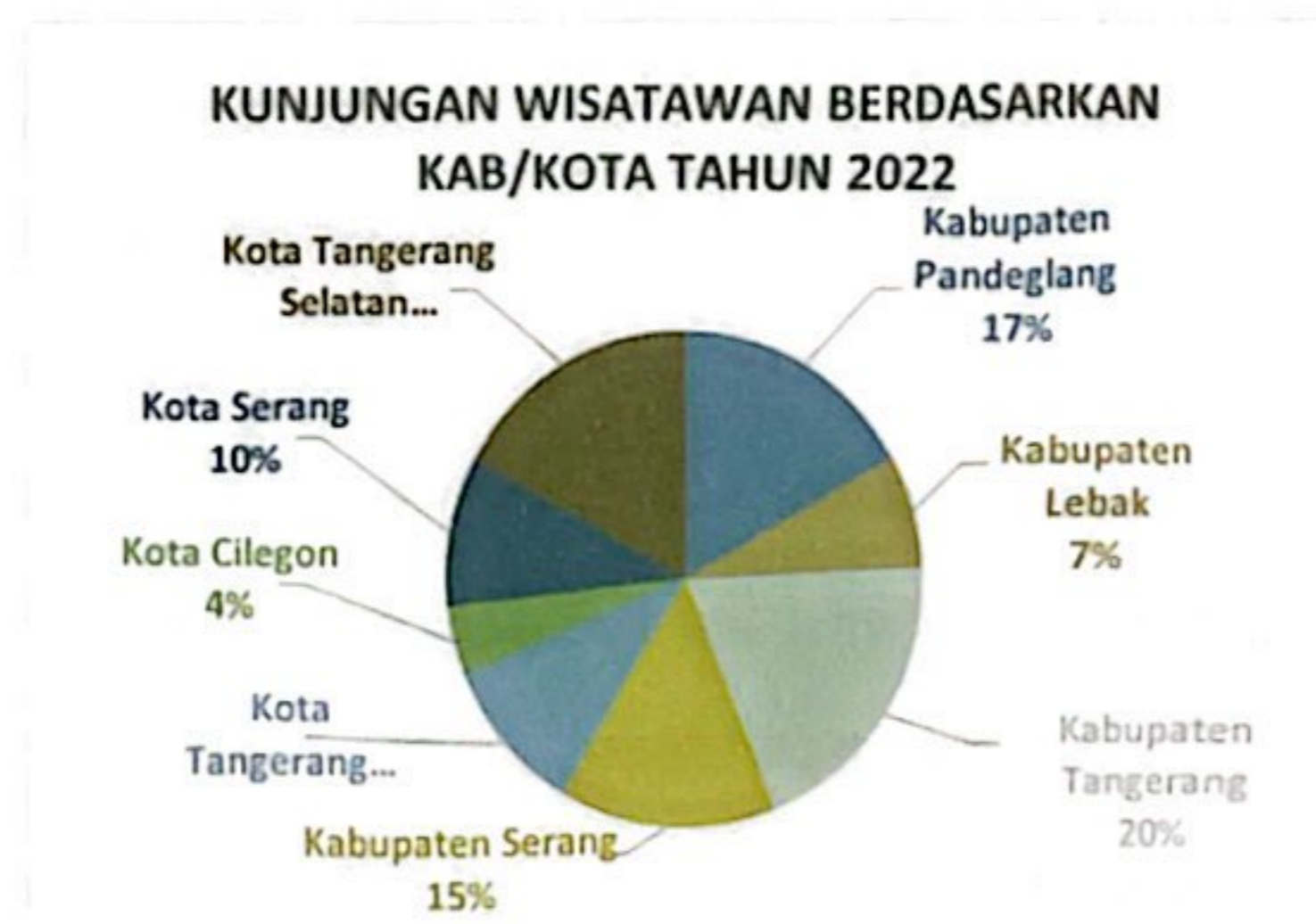
it has, so the Tangerang Regency Government is trying to collaborate with various parties or what is called collaborative governance. This research aims to analyze the collaborative governance process in managing Tanjung Kait Beach tourism and the factors that encourage or hinder it. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that the collaborative governance process in managing Tanjung Kait Beach is already running, but is still not optimal. This is because there are still actors who have not shown a strong commitment to coordination forum activities, such as not participating actively. In an effort to build trust, there are still actors who are less open, that is, they have not conveyed comprehensive information. The driving factor for this collaboration is the existence of good initial conditions because the actors have the awareness to collaborate which is driven by the limited resources of each actor and the existence of leaders who have made various efforts to empower actors, namely through training, coaching and monitoring. Meanwhile, the inhibiting factor for this collaboration is the institutional design factor, which includes basic rules in the collaboration process where openness between several actors in this collaboration is still lacking.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism, Tanjung Kait Beach

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dinilai dapat mengembangkan sektor-sektor lain dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pariwisata adalah salah satu sumber devisa terbesar dalam suatu negara, bahkan sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah khususnya di negara berkembang banyak yang menggunakan sektor pariwisata untuk meningkatkan PDB daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khasnya tersendiri yang dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut. Salah satu wilayah di Indonesia, tepatnya di Provinsi Banten yang mempunyai banyak potensi untuk menarik wisatawan adalah Kabupaten Tangerang. Hal ini karena Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak di Provinsi Banten. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai 2.369.556 orang atau 19,8% dari seluruh jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Banten (lihat gambar 1.2).

Gambar 1.1 Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2022



Sumber: ExcitingBanten.id

Salah satu tempat wisata populer di Kabupaten Tangerang adalah objek wisata pantai. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Tangerang dimana daerah utaranya merupakan daerah pantai. Berdasarkan RENSTRA Disporabudpar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, kawasan pantai yang berpotensi di Kabupaten Tangerang diantaranya yaitu Pantai Tanjung Kait yang terletak di Kecamatan Mauk. Pantai Tanjung Kait adalah salah satu pantai yang tidak hanya memiliki objek wisata pantai, tetapi juga memiliki objek wisata lain seperti sejarah, budaya, wisata kuliner, dermaga perahu dan aktivitas rekreasi seperti pemancingan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif di Pantai Tanjung Kait sangat penting untuk dilakukan agar jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Tanjung Kait dapat mengalami peningkatan. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya dan didukung oleh pernyataan dari pihak Pokdarwis Pantai Tanjung Kait serta Pemerintah Desa Tanjung Anom bahwa belakangan ini Pantai Tanjung Kait mengalami sepi pengunjung. Sepinya kunjungan wisatawan ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi pantai yang kumuh dan kotor, kawasan sekitar pantai yang tidak terawat, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kebersihan, tata kelola dan keindahan di Pantai Tanjung Kait kurang baik. Selain itu, juga disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai serta masih banyak ditemukannya pungutan liar.

Untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan potensinya sebagai objek wisata, Pantai Tanjung Kait tentu sangat membutuhkan pengelolaan yang baik. Dengan berbagai permasalahan yang ada di Pantai Tanjung Kait saat ini, tentu tidak dapat diatasi oleh satu lembaga saja, harus ada kerja sama yang dilakukan antara lembaga pemerintahan, kelompok masyarakat dan juga pihak swasta. Hal tersebut karena adanya keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada, baik itu keterbatasan dalam sumber daya manusia, materi, infrastruktur maupun jaringan.

Kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan publik disebut dengan *Collaborative Governance*. Menurut Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suitri, 2019), *collaborative governance* adalah kerja sama yang dijalankan oleh beberapa instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung dalam menentukan suatu keputusan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam memperbaiki kondisi Pantai Tanjung Kait, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang memiliki keterbatasan sumber daya dalam melakukan hal tersebut, sehingga mereka berupaya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak atau yang disebut *collaborative governance*, karena menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya terkait banyaknya permasalahan yang ada di Pantai Tanjung Kait dan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga mereka melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengatasi hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dari berbagai aktor dalam upaya mengelola Pantai Tanjung Kait guna memperbaiki kondisi Pantai Tanjung Kait, yang mana hal tersebut dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang”.

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chander dan Plano (dalam Keban, 2014:3), diartikan sebagai proses pengorganisasian sumber daya dan staff publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan serta mengatur keputusan-keputusan yang bersifat publik. Nigro dan Nigro (dalam Sodikin, 2015:5), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah sebuah kerja sama kelompok di lingkungan pemerintahan dimana memiliki peran yang sangat krusial dalam merumuskan kebijakan negara, dengan demikian termasuk bagian dari proses politik. Dari pandangan tersebut, administrasi publik dapat diartikan sebagai suatu proses kerja sama yang dijalankan oleh beberapa individu dan lembaga dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk meraih tujuan awal secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara memadai.

Manajemen Publik

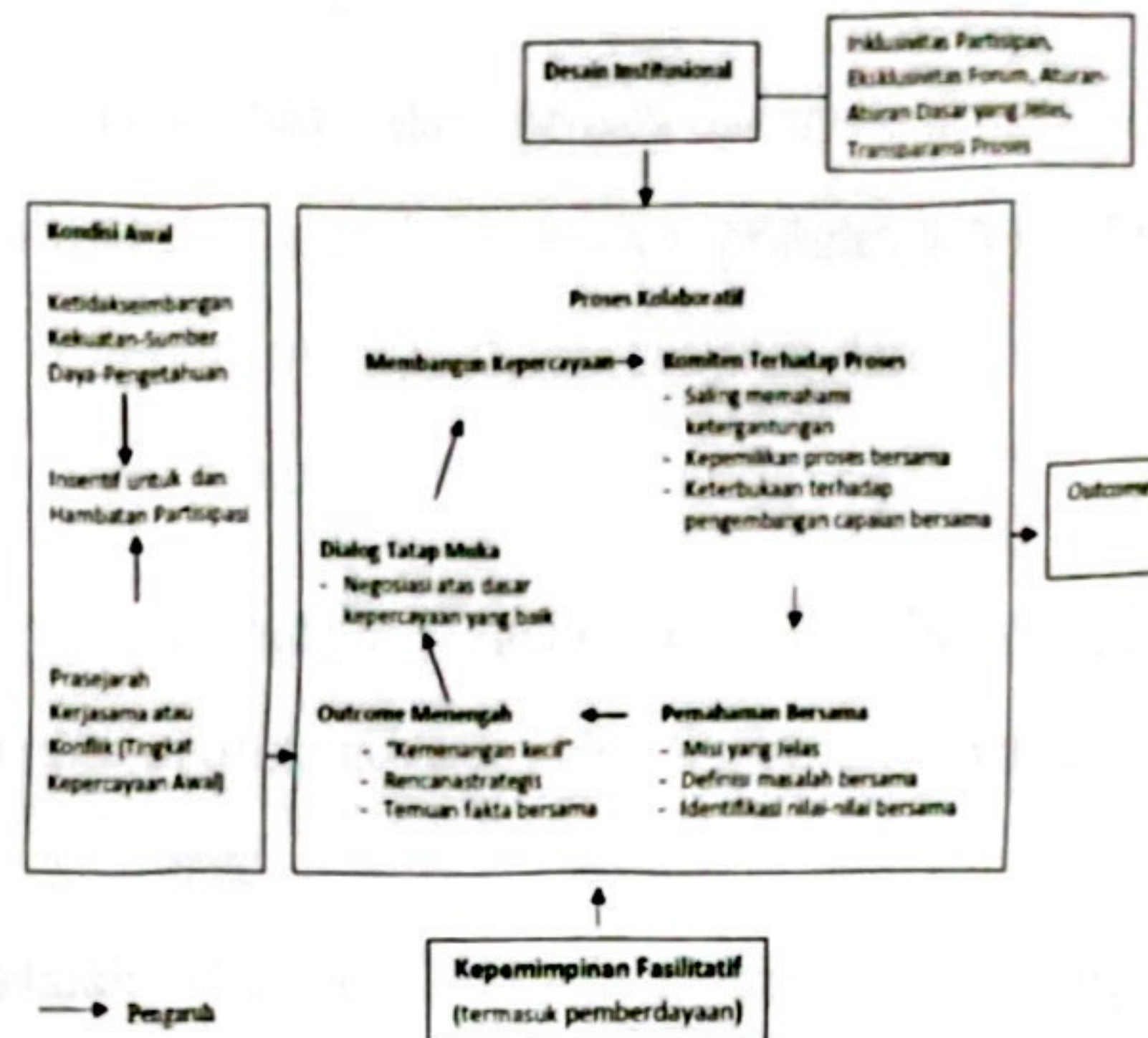
Overman (dalam Keban, 2004) mengatakan manajemen publik adalah suatu disiplin ilmu lintas disiplin yang mempelajari berbagai aspek umum organisasi dan merupakan kombinasi dari tugas manajemen dengan sumber daya manusia, informasi, keuangan, politik, dan fisik. Manajemen publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk melayani dan mengatasi masalah-masalah yang terdapat di publik dengan tujuan meraih target-target yang telah ditetapkan.

Collaborative Governance

Collaborative Governance menurut Emerson, et al (dalam Molla, dkk 2021), adalah suatu proses manajemen yang terstruktur yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor,

seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik untuk mencapai suatu tujuan. Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019) berpendapat bahwa *collaborative governance* adalah proses kerjasama atau kolaborasi yang mengikutsertakan berbagai lembaga publik dan pihak terkait lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang tujuannya untuk menyelesaikan isu-isu publik.

Gambar 1.2 Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019)

Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa proses kolaborasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Dialog Tatap Muka (*Face to face Dialogue*)

Semua proses kolaborasi dibentuk dari dialog tatap muka antara berbagai pihak yang terlibat. Dialog tatap muka sangat penting untuk menemukan peluang dan keuntungan bersama. Dialog tatap muka ini bukan sekadar negosiasi biasa, melainkan dapat meningkatkan komunikasi serta mengurangi konflik antar pihak-pihak yang terlibat.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan harus dimulai sejak awal kolaborasi dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya egosentrisme antar pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, membangun kepercayaan ini, sangat membutuhkan kehadiran pemimpin yang memahami betapa pentingnya kolaborasi.

c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen adalah dorongan untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kolaborasi. Setiap pihak yang terlibat harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mengurangi risiko proses

kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan agar memandang hubungan yang dijalankan sebagai sesuatu yang baru dan harus diperkuat.

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Seluruh aktor dalam proses kolaborasi harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang dapat dicapai melalui kerjasama. Pemahaman yang sama ini mencakup memiliki visi, misi dan tujuan bersama. Hal ini juga dapat memengaruhi tercapainya kesepakatan bersama dalam menafsirkan dan memahami suatu isu.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara adalah hasil dari proses kolaborasi yang dihasilkan dalam bentuk output yang dapat dilihat dan memiliki potensi pengaruh terhadap kelanjutan kolaborasi. Hasil sementara ini mampu memperkuat kepercayaan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi.

Ansell dan Gash (2008) menguraikan beberapa variabel yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses *collaborative governance*, di antaranya yaitu:

a. Kondisi Awal

Kondisi awal adalah tahap awal dalam membentuk hubungan, di mana aktor-aktor dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda memutuskan untuk bekerja sama guna mencapai visi dan tujuan bersama. Tahapan ini terdiri dari tiga aspek yaitu ketimpangan kekuasaan atau pengaruh *stakeholder*, pengetahuan, sumber daya, sejarah terkait kerjasama atau konflik antar *stakeholder*, dorongan dan hambatan dalam kolaborasi.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan para pemangku kepentingan ke dalam forum untuk mencapai konsensus mengenai kejelasan peraturan, membangun kepercayaan, berbagi keuntungan bersama, dan memberdayakan mereka.

c. Desain Institusional

Desain institusional mencakup kerangka peraturan yang ada dalam kolaborasi dan telah disetujui oleh semua aktor yang terlibat. Hal ini juga berkaitan dengan transparansi, di mana para aktor memiliki keyakinan bahwa proses tersebut setara, menyeluruh, dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian di bidang sosial yang mengimplementasikan pendekatan deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk

menggambarkan dan mendeskripsikan berbagai situasi, kondisi atau fenomena sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Disporabudpar Kabupaten Tangerang, Pemerintah Desa Tanjung Anom, Pokdarwis Pantai Tanjung Kait, swasta (PT PLN UID Banten), masyarakat pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

Proses *collaborative governance* yang terdapat dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait melibatkan berbagai aktor antara lain Disporabudpar Kabupaten Tangerang, Pemerintah Desa Tanjung Anom, Pokdarwis Pantai Tanjung Kait dan pihak swasta yakni PT PLN UID Banten. Ansell dan Gash mengemukakan bahwa proses kolaborasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen terhadap Proses, Pemahaman Bersama dan Hasil Sementara.

a. Dialog Tatap Muka (*Face to face Dialogue*)

Dialog tatap muka dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait dilakukan melalui sebuah forum koordinasi. Kegiatan dialog tatap muka ini dilakukan pertama kali pada tahun 2022 dan dilakukan secara rutin yaitu tiga bulan sekali. Pertemuan rutin yang dilakukan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan Pantai Tanjung Kait serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya dan juga menjadi sarana untuk berdiskusi tentang langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

Dialog tatap muka sebagaimana yang disampaikan oleh Ansell dan Gash ialah bukan sekadar negosiasi biasa, melainkan dapat meningkatkan komunikasi serta mengurangi konflik dan kurangnya rasa saling menghormati antar pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut telah sesuai dengan forum koordinasi yang telah dilakukan karena dalam kegiatan tersebut terjadi komunikasi secara langsung antar aktor yang terlibat, seperti adanya pertukaran informasi yang dilakukan para aktor mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait serta kendala-kendala yang dihadapinya. Komunikasi yang dilakukan secara intensif ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan setiap aktor. Di samping itu, kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi semua aktor yang terlibat, dimana dalam kegiatan tersebut masing-masing aktor dapat menyampaikan pendapatnya mengenai hal-hal yang menyangkut pengelolaan Pantai Tanjung Kait. Namun, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam

pertemuan tersebut Pemerintah Desa Tanjung Anom masih kurang aktif dalam berpartisipasi disetiap pertemuan yang diadakan.

Ansell dan Gash juga mengemukakan bahwa dialog tatap muka antara berbagai pihak yang terlibat juga dilakukan untuk meraih kesepakatan bersama. Maka, hal tersebut telah sesuai dengan forum koordinasi yang dilakukan karena di dalam kegiatan tersebut telah terdapat kesepakatan bersama yang dihasilkan, yang mana kesepakatan tersebut disesuaikan dengan masing-masing pihak sesuai dengan kepentingannya. Adapun kesepakatan yang ada yaitu kesepakatan untuk tidak membuat pengunjung merasa kecewa, kesepakatan terkait perizinan untuk mengelola pantai dan pembentukan pokdarwis secara resmi dan kesepakatan terkait program yang akan dijalankan yang dimuat dalam lembar perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait yang dilakukan melalui forum koordinasi sudah berjalan, tetapi belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pertemuan yang diadakan telah berjalan secara rutin dan pertemuan tersebut juga memberikan manfaat bagi semua aktor yang terlibat. Akan tetapi, dalam kegiatan tersebut masih terdapat pihak yang kurang berpartisipasi secara aktif sehingga hal ini dapat menghambat proses kerjasama yang dilakukan.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah munculnya egosentrisme antar pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, membangun kepercayaan ini, sangat membutuhkan kehadiran pemimpin yang memahami betapa pentingnya kolaborasi. Sehingga, dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini, Disporabudpar Kabupaten Tangerang sebagai pemimpin melakukan beberapa upaya menumbuhkan kepercayaan para aktor. Membangun kepercayaan dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini dilakukan melalui komunikasi yang dilakukan secara intensif. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung dilakukan dalam setiap pertemuan yang diadakan seperti forum koordinasi yang rutin dilaksanakan maupun kegiatan *monitoring*. Sedangkan, komunikasi secara tidak langsung biasanya dilakukan secara daring melalui *groupchat*. Akan tetapi, dalam hal ini komunikasi antar Pokdarwis Pantai Tanjung Kait dengan Pemerintah Desa Tanjung Anom dapat dikatakan masih kurang baik karena komunikasi yang dilakukan masih kurang intensif.

Dalam membangun kepercayaan, para aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait juga berupaya dengan menunjukkan sikap terbuka yaitu dengan saling

memberi informasi dan saling mempercayai informasi yang diberikan. Dimana informasi tersebut biasanya disampaikan secara daring melalui *groupchat*. Meskipun demikian, Disporabudpar Kabupaten Tangerang sendiri merasa bahwa Pokdarwis Pantai Tanjung Kait belum sepenuhnya terbuka dalam memberikan informasi kepada Disporabudpar Kabupaten Tangerang, ini karena informasi yang disampaikan cenderung terkait permasalahan saja.

Selanjutnya, dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini tidak menunjukkan adanya ego sektoral, yang mana hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini para aktor yang terlibat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan antara satu sama lain karena mereka tidak dapat mengatasi permasalahan dan mencapai tujuannya secara individu. Sehingga, mereka saling berkolaborasi yang mana kolaborasi tersebut merupakan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa aktor untuk mengambil suatu keputusan untuk mengatasi suatu permasalahan publik.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang membangun kepercayaan, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait telah dibangun, tetapi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan seperti komunikasi yang dilakukan secara intensif, baik secara langsung maupun tidak langsung serta sikap saling terbuka antar aktor yaitu dengan memberikan informasi secara daring. Selain itu, juga dapat dilihat dari para aktor yang saling membutuhkan antar satu sama lain. Namun, dalam hal ini, pihak Disporabudpar Kabupaten Tangerang merasa bahwa Pokdarwis Pantai Tanjung Kait belum sepenuhnya bersikap terbuka karena belum menyampaikan informasi secara menyeluruh.

c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen menunjukkan kesungguhan setiap pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan bersama. Komitmen dalam proses kolaborasi adalah faktor yang sangat krusial. Berhasil atau tidaknya suatu kolaborasi dapat dilihat dari tingkat komitmen para aktor terhadap kolaborasi. Komitmen dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung kait ini dilihat dari pelaksanaan tugas dan peranan masing-masing aktor yang terlibat. Adapun bentuk komitmen Disporabudpar Kabupaten Tangerang disini ditunjukkan melalui pemantauan yang dilakukan terhadap pengelolaan Pantai Tanjung Kait dan pemberian pelatihan dan pembinaan secara rutin kepada pokdarwis. Selanjutnya, bentuk komitmen Pokdarwis Pantai Tanjung Kait ditunjukkan dari tekad mereka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dalam menciptakan lingkungan wisata yang ramah, rapih dan nyaman bagi pengunjung, serta mereka juga bergerak secara mandiri tanpa harus selalu menunggu arahan.

Adapun bentuk komitmen PT PLN UID Banten ditunjukkan melalui pemberian bantuan berupa pembangunan *icon* pantai, *booth* UMKM, mesin penggiling dan pembangunan gudang. Akan tetapi, Pemerintah Desa Tanjung Anom sendiri kurang berkomitmen dalam kolaborasi yang dilakukan karena Pemerintah Desa Tanjung Anom hanya memberikan izin kepada Pokdarwis Pantai Tanjung Kait tanpa terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan dalam kolaborasi ini setelahnya, seperti pada kegiatan forum koordinasi yang rutin dilakukan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai komitmen terhadap proses, maka dapat disimpulkan bahwa belum semua aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi menunjukkan komitmen yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi aktif dari pihak Pemerintah Desa Tanjung Anom dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses kolaborasi, seperti pada kegiatan forum koordinasi yang dilakukan. Namun, pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses kolaborasi ini telah menunjukkan komitmen yang baik, dimana mereka telah berusaha menjalankan tugas dan perannya masing-masing

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Ansell dan Gash menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi harus mempunyai pemahaman yang sama terkait visi dan tujuan yang ingin dicapai melalui kerjasama. Hal ini telah sesuai dengan kondisi dalam kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait. Dimana berdasarkan hasil penelitian bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini telah mempunyai pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai yaitu memperbaiki kondisi Pantai Tanjung Kait dan menjadikan Pantai Tanjung Kait sebagai destinasi wisata yang diminati oleh pengunjung sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dengan harapan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat setempat pun dapat meningkat. Tujuan bersama ini ditetapkan secara bersama-sama oleh para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Upaya dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait melibatkan banyak pihak karena sadar bahwa tujuan tersebut tidak dapat tercapai jika hanya diupayakan secara individu.

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai pemahaman bersama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola Pantai Tanjung Kait telah terdapat pemahaman bersama yang baik antar aktor yang terlibat terkait tujuan yang ingin dicapai. Para aktor yang terlibat telah mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin memperbaiki kondisi Pantai Tanjung Kait agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang harapannya dapat menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara menurut Ansell dan Gash adalah hasil dari proses kolaborasi yang dihasilkan dalam bentuk output yang dapat dilihat. Hal ini telah sesuai dengan kondisi dalam kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait. Dimana, berdasarkan hasil penelitian bahwa telah terdapat capaian sementara yang dihasilkan dari proses kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait yaitu berupa peningkatan fasilitas yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan Pantai Tanjung Kait, yaitu seperti *icon* pantai, gapura, taman bermain anak, *booth* UMKM, pembangunan gudang limbah kerang dan mesin penggilingan yang merupakan bantuan dari pemerintah dan CSR yakni PLN UID Banten. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Pantai Tanjung Kait. Ukuran keberhasilan kolaborasi dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pariwisata pantai tersebut. Sehingga, capaian sementara yang telah dihasilkan ini tidak menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait yang dilakukan.

Ansell dan Gash menyebutkan bahwa dalam tahap hasil sementara dalam proses terdapat rencana strategis yang akan dilakukan. Hal ini telah sesuai dengan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait. Dimana berdasarkan hasil penelitian bahwa rencana strategis dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini yaitu mencakup penambahan fasilitas yang ada di Pantai Tanjung Kait yaitu berupa pembangunan *jogging track* dan arena bermain air untuk anak-anak.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong atau Menghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

a. Kondisi Awal

Kondisi awal adalah fase pertama dalam membangun hubungan, dimana aktor-aktor yang mempunyai urgensi dan target yang berbeda menetapkan untuk berkolaborasi demi mencapai visi dan tujuan bersama. Ansell dan Gash menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam kondisi awal kolaborasi adalah adanya ketidakseimbangan sumber daya. Permasalahan mengenai sumber daya disini yaitu mencakup ketersediaan sumber daya manusia, materiil, dan infrastruktur yang dapat menunjang proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi menyadari bahwa pengelolaan Pantai Tanjung Kait tersebut tidak dapat dilakukan secara individual, karena masing-masing dari mereka memiliki keterbatasan sumber daya baik itu sumber daya manusia

dari segi kualitas maupun kuantitas dan sumber daya keuangan. Selain itu juga karena mengingat banyaknya permasalahan yang ada di Pantai Tanjung Kait sendiri.

Aspek lain dalam kondisi awal kolaborasi yang disampaikan Ansell dan Gash adalah insentif untuk berpartisipasi. Ansell dan Gash menekankan bahwa insentif tidak selalu berkaitan dengan finansial. Insentif didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Gunton dan Hari (dalam Ansell dan Gash, 2008) mengemukakan bahwa salah satu yang mempengaruhi insentif organisasi untuk ikut serta dalam sebuah kolaborasi adalah ketidakseimbangan sumber daya. Dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang mana hal ini mendorong para aktor untuk bekerja sama dan berkolaborasi guna memperbaiki Pantai Tanjung Kait, yang sebelumnya menjadi tujuan wisata *favorite* di Kabupaten Tangerang.

Dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini juga telah terdapat visi dan tujuan bersama yang dibentuk dan ditetapkan dengan cara disepakati secara bersama-sama.. Adapun visi dan tujuan bersama dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Pantai Tanjung Kait. Dengan memperoleh kunjungan yang lebih banyak, harapannya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, karena tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Dengan demikian, dengan adanya kondisi awal yang baik, dimana para aktor memiliki kesadaran untuk berkolaborasi yang didorong oleh adanya keterbatasan sumber daya dari masing-masing aktor dan telah adanya visi dan tujuan bersama, ini menjadi faktor yang mendorong proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor krusial dalam *collaborative governance*, yang mana kepemimpinan ini memainkan peran kunci dalam menyelesaikan konflik dan memberdayakan para aktor (Ansell dan Gash, 2008). Hal ini telah sesuai dengan kondisi yang ada dalam proses kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait. Dimana berdasarkan hasil penelitian telah ada pemimpin dalam kolaborasi ini yang telah melakukan pemberdayaan terhadap aktor yang terlibat yaitu dengan pemberian bimbingan atau arahan kepada para aktor melalui pelatihan dan pembinaan. Kepemimpinan dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini dipegang oleh Disporabudpar Kabupaten Tangerang.

Dalam konteks kepemimpinan ini, Disporabudpar Kabupaten Tangerang berupaya memberikan arahan dan bimbingan melalui pelatihan dan pembinaan kepada Pokdarwis Pantai Tanjung Kait. Pelatihan dan pembinaan ini diadakan secara rutin yakni dua kali dalam setahun. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan mencakup aspek wisata yakni pengelolaan dan pengembangan wisata. Dalam kegiatan tersebut, Disporabudpar Kabupaten Tangerang juga melibatkan berbagai organisasi pariwisata Indonesia seperti Balawista, GenPi, HPI, IPI, dan lain sebagainya. Selain itu, Disporabudpar Kabupaten Tangerang juga melakukan *monitoring* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Pantai Tanjung Kait sebagai upaya dalam aspek kepemimpinan ini. Oleh karena itu, dengan keberadaan pemimpin yang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan aktor yaitu melalui pelatihan dan pembinaan serta *monitoring* yang dilakukan, menjadi pendorong dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

c. Desain Institusional

Desain institusional dalam proses *collaborative governance* yakni mencakup kerangka kerja peraturan yang telah disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Desain institusional dalam proses *collaborative governance* juga mencakup aspek transparansi atau keterbukaan. Hal ini telah sesuai dengan kondisi yang ada dalam proses kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait. Dimana berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait telah terdapat aturan jelas yang berupa perjanjian untuk saling menjaga kepercayaan antar satu sama lain dengan bersikap saling terbuka dan konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah disepakati untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun aturan tersebut disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pihak yang terlibat.

Para aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini dapat dikatakan belum semuanya bersikap terbuka antar satu sama lain. Dimana pihak Disporabudpar Kabupaten Tangerang menganggap bahwa tingkat keterbukaan pokdarwis masih kurang karena pokdarwis belum menyampaikan informasi secara menyeluruh, melainkan pokdarwis hanya memberikan informasi terkait permasalahan saja. Di sisi lain, Pokdarwis Pantai Tanjung Kait juga merasa bahwa Pemerintah Desa Tanjung Anom kurang bersikap terbuka dalam kerja sama, hal ini karena kurangnya intensitas komunikasi yang dilakukan oleh pihak desa tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kekurangan dalam tingkat keterbukaan di antara para pihak yang mana hal tersebut sebenarnya merupakan aturan dasar dalam proses kolaborasi, maka hal ini menjadi hambatan dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang sudah berjalan, tetapi masih belum optimal. Hal ini karena masih terdapat aktor yang belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam proses kolaborasi ini, dimana dalam kegiatan forum koordinasi, seperti kurang berpartisipasi secara aktif. Dalam upaya membangun kepercayaan juga masih terdapat aktor yang bersikap kurang terbuka yang mana belum menyampaikan informasi secara menyeluruh. Faktor pendorong dalam proses kolaborasi ini yaitu pertama, kondisi awal, dimana dalam proses kolaborasi ini telah menunjukkan kondisi yang baik karena para aktor memiliki kesadaran untuk berkolaborasi guna memperbaiki Pantai Tanjung Kait yang didorong oleh adanya keterbatasan sumber daya dari masing-masing aktor. Kedua, keberadaan pemimpin yang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan aktor yaitu melalui pelatihan dan pembinaan serta *monitoring*. Sedangkan, faktor penghambat dalam proses kolaborasi ini adalah faktor desain institusional yaitu terkait ketidakterbukaan beberapa aktor terhadap aktor lainnya, yang mana hal tersebut sebenarnya merupakan aturan dasar dalam proses kolaborasi ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, penulis merekomendasikan untuk memperkuat komitmen aktor yang masih kurang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kolaborasi ini, yaitu dengan melibatkan semua aktor yang terlibat dalam kolaborasi pada setiap proses pengambilan keputusan dan menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing aktor sangat penting.
2. Untuk mengatasi faktor desain institusional yang menghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, diperlukan:
 - a. Diskusi terbuka dan *brainstorming* antar para aktor yang terlibat yang diselenggarakan oleh Disporabudpar Kabupaten Tangerang agar para aktor merasa lebih terbuka untuk berbagi ide dan masalah

- b. Pertemuan individu antar aktor yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses *collaborative governance* untuk membuka ruang diskusi yang lebih mendalam
- c. Evaluasi yang dilakukan oleh Disporabudpar Kabupaten Tangerang secara objektif dan konstruktif terhadap kolaborasi yang dilakukan dan pemberian kesempatan bagi setiap aktor untuk memberikan umpan balik tentang proses kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170-177.
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). *Collaborative Governance* dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FISIPUBLIK: JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Astuti, R. S., Hardi, W., Abd, R. (2020). *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik Faakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Bellastuti, D. B. (2020). Analisis Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Skripsi*. Program Studi Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- ExcitingBanten.id. (2023). "Statistik Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Kab/Kota". <https://excitingbanten.id/statistik/2022/1>. (Diakses pada tanggal 24 Maret 2023).
- Haris, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintahan. *Sosfilkom*, 13 (1), 33-47.
- Keban, T. Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Maulana, R. F., Asmawi, M. R., & Utami, P. (2022). Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6297-6301.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). *Collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabu-bak kabupaten sumba barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140-148.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). *Collaborative Governance* dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 8(3), 1-18.
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 281-298.